

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat disusun. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Semoga dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Jumantono di dalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Karanganyar, 19 September 2025

Camat Jumantono



Gunawan, S.E., M.M.

NIP. 196712231994011002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sistematika.....	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II-14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi.....	III-3
3.3. Arah Kebijakan	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-20
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Sesuai Pendidikan Tahun 2024.....	II-3
Tabel 2.3.	Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	II-4
Tabel 2.4.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.5.	Tabel Capaian Anggaran Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.6.	Permasalahan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.....	II-12
Tabel 2.7.	Isu Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	II-13
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2.	Tahapan Rencana Strategis.....	III-5
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.....	III-8
Tabel 4.1.	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jumantono	IV-4
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-13
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-18
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.....	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I-2
Gambar 3.1.	Tema Prioritas Pembangunan Kecamatan Jumantono Tahun 2026-2030	II-6

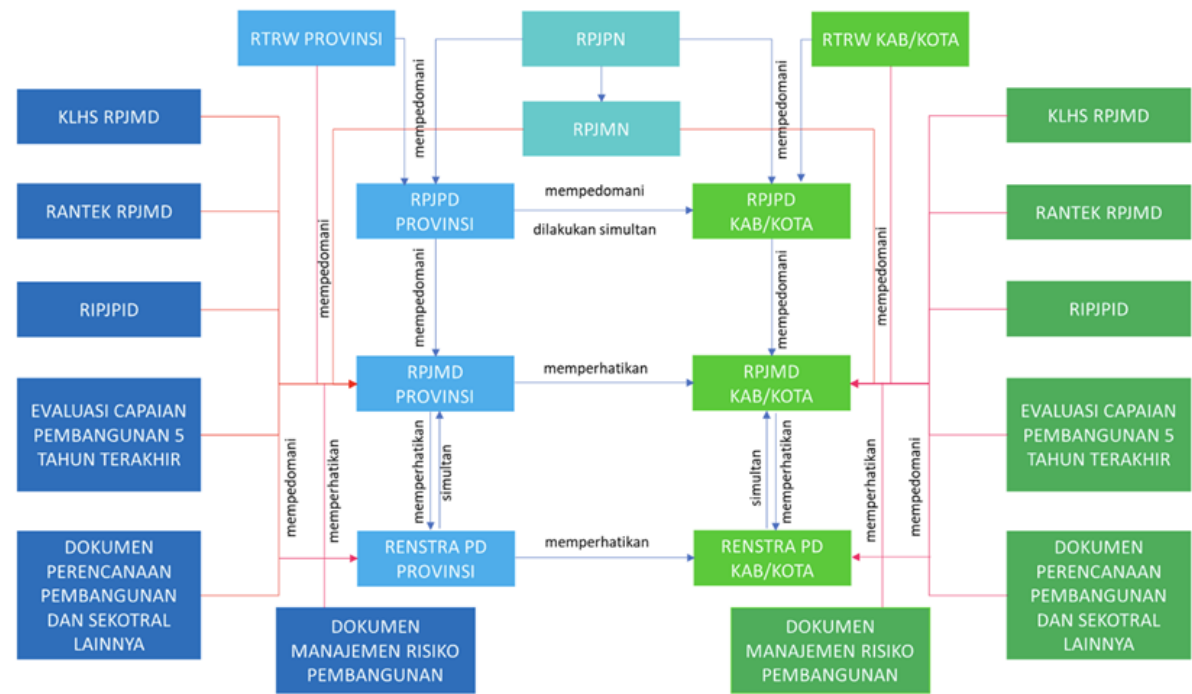
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Kecamatan Jumantono dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan.

Renstra ini disusun berdasarkan kerangka hukum yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya pembangunan yang direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang secara teknis mengarahkan proses penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan di daerah.

Dokumen ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. RPJMD tersebut menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis agar sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah, kedudukan Renstra Perangkat Daerah memiliki posisi strategis yang berfungsi menghubungkan perencanaan makro dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih teknis dan operasional.



Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan, Kecamatan Jumantono memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi lintas sektor, fasilitasi kegiatan pembangunan, serta pelayanan administratif kepada masyarakat. Tantangan pembangunan di wilayah Kecamatan Jumantono antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar dan sosial yang merata.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Jumantono.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika

Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subbab ini menjelaskan alasan atau urgensi disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Subbab ini memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra.

1.3. Maksud dan Tujuan

Subbab ini menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Subbab ini menggambarkan struktur atau susunan isi dari dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya, serta kelompok sasaran layanan. Pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3. Pada subbab ini paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama periode Renstra (biasanya 5 tahun). Tujuan adalah pernyataan umum tentang arah pembangunan atau hasil jangka menengah yang akan dicapai.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini merinci sasaran sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan biasanya dapat diukur.

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan cara atau pendekatan umum yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan atau fokus kegiatan yang akan diambil dalam rangka menjalankan strategi dan mencapai sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikator dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun uraian tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerin tahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 menunjukkan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar tahun 2024 berdasarkan golongan. Total terdapat 13 PNS dengan dominasi pada golongan III sebanyak 10 orang (5 laki-laki, 5 perempuan), diikuti golongan IV sebanyak 2 orang (2 laki-laki), dan golongan II sebanyak 1 orang (1 laki-laki). Pada Kecamatan Jumantono, tidak terdapat PNS golongan I.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	0
2	Golongan II	-	-	0
3	Golongan III	5	5	10
4	Golongan IV	2	-	2
Jumlah		7	5	12

Tabel 2.2 menunjukkan distribusi pegawai di Kecamatan Jumantono tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dan status ASN/non-ASN: total 31 pegawai (12 ASN: 7 laki-laki, 5 perempuan; 18 non-ASN: 10 laki-laki, 8 perempuan). Tidak ada pegawai dengan pendidikan SMP; lulusan SMA sederajat berjumlah 11 (3 ASN: 1 laki-laki, 2 perempuan; 8 non-ASN: 6 laki-laki, 2 perempuan), lulusan D3 berjumlah 3 (1 perempuan; 2 non-ASN: 2 perempuan), lulusan S1

sebanyak 11 (4 ASN: 1 laki-laki, 3 perempuan; 7 non-ASN: 3 laki-laki, 4 perempuan), dan lulusan S2 sebanyak 5 pegawai (seluruhnya ASN laki-laki). Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pegawai memiliki minimal pendidikan SMA dengan proporsi signifikan lulusan S1 dan S2, mendukung kapabilitas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Sesuai Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		ASN		Non ASN		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
2	SMA Sederajat	1	2	6	2	11
3	D3	-	-	1	2	3
4	S1	1	3	3	4	11
5	S2	5	-	-	-	5
JUMLAH		7	5	10	8	30

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Jumantono dilengkapi sarana dan prasarana yang umumnya memadai meski beberapa perlu perawatan. Infrastruktur fisik mencakup 1 unit bangunan kantor permanen, 1 gedung kantor lain-lain, 1 gedung pertemuan permanen, dan 1 area parkir terbuka permanen. Mobilitas operasional tersedia 1 unit station wagon dan 4 unit sepeda motor; selain itu ada 1 unit penyemprot otomatis yang mendukung kegiatan lapangan.

Perlengkapan perkantoran meliputi lemari besi/metal (9 unit, 6 dalam kondisi baik, 3 kurang baik) dan filing cabinet besi (9 unit, 6 baik, 3 kurang baik); berbagai meja dan kursi: meja rapat (8 unit, semua baik), meja kerja eselon IV (4 unit), meja kerja pejabat lain-lain (11 unit); kursi besi/metal (45 unit, 40 baik, 5 kurang baik), kursi rapat (82 unit, 68 baik, 14 kurang baik), kursi rapat ruangan pejabat eselon III (9 unit baik), kursi tamu (3 unit, 2 baik, 1 kurang baik), kursi biasa (7 unit baik), bangku tunggu (3 unit baik), kursi lipat (7 unit baik), kursi sofa warna hitam (1 unit baik), serta kursi pejabat lainnya (2 unit baik). Tersedia juga tempat tidur kayu (1 unit baik) dan kasur/spring bed (1 unit baik) untuk kebutuhan istirahat sementara. AV dan komunikasi mencakup sound system (1 unit baik), microphone (1 unit baik), microphone floor stand (3 unit baik), mimbar/podium (1 unit baik), layar film/proyektor (2 unit baik), telephone PABX (1 unit baik), scanner (2 unit baik), serta unit power supply/modem (1 unit modem baik).

Sarana TI meliputi 5 unit PC (semua baik), 13 unit laptop (12 baik, 1 rusak berat), 4 monitor (semua baik), 7 printer (semua baik), dan perangkat jaringan lainnya. Fasilitas kenyamanan kantor tersedia AC window (5 unit baik), kipas angin (8 unit baik), rice cooker (1 unit baik), kompor gas (1 unit baik), tabung gas (2 unit baik), dan alat rumah tangga lain-lain (3 unit baik). Peralatan keselamatan dasar didukung oleh 1 unit penyemprot otomatis. Secara keseluruhan, meski sebagian inventaris—seperti beberapa lemari, filing cabinet, kursi rapat, kursi tamu, dan 1 laptop—memerlukan perbaikan atau penggantian, ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan

Jumantono masih mampu menunjang tugas administrasi, operasional lapangan, dan pelayanan publik dengan efektif, asalkan pemeliharaan berkala dan perbaikan diutamakan.

Tabel 2.3.
Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Station Wagon	1	1		
3	Sepeda Motor	4	4		
4	Penyemprot Otomatis	1	1		
5	Lemari Besi/Metal	9	6	3	
6	Filing Cabinet Besi	9	6	3	
7	Kursi Besi/Metal	45	40	5	
8	Meja Rapat	8	8		
9	Tempat Tidur Kayu	1	1		
10	Kasur/Spring Bed	1	1		
11	Kursi Rapat	82	68	14	
12	Kursi Tamu	3	2	1	
13	Kursi Biasa	7	7		
14	Bangku Tunggu	3	3		
15	Kursi Lipat	7	7		
16	A.C Window	5	5		
17	Kipas Angin	8	8		
18	Kompore Gas	1	1		
19	Rice Cooker	1	1		
20	Tabung Gas	2	2		
21	Sound System	1	1		
22	Microphone	1	1		
23	Microphone Floor Stand	3	3		
24	Mimbar/Podium	1	1		
25	Alat Rumah Tangga lain-lain	3	3		
26	Meja Kerja Eselon IV	4	4		
27	Meja Kerja Pejabat lain-lain	11	11		
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	9	9		
29	Layar Film/Projector	2	2		
30	Telephone (PABX)	1	1		
31	P.C Unit	5	5		
32	Laptop	13	12	1	
33	Monitor	4	4		
34	Printer	7	7		
35	Modem	1	1		
36	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
37	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	1	1		
38	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
39	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1		
40	Kursi sofa warna hitam	1	1		
41	Scaner	2	2		
42	Kursi Pejabat lainnya	2	2		

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar tahun 2021–2024 menunjukkan dinamika perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pada indikator Nilai SAKIP, kinerja sempat mengalami fluktuasi. Tahun 2021 realisasi mencapai skor 73,50, kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 69 dengan capaian di bawah target. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan dengan capaian melampaui target, yaitu 103,3 persen, meskipun kembali menurun pada tahun 2024 dengan capaian 91,16 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan di Jumantono sudah berjalan baik, tetapi konsistensi pencapaian target masih menjadi tantangan.

Pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM), data yang tersedia mulai terlihat sejak tahun 2023. Nilai IDM tahun tersebut mencapai 0,6935, kemudian meningkat pada 2024 menjadi 0,7157 dengan capaian 89,46 persen dari target yang ditetapkan. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan desa, khususnya pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Meski capaian belum sepenuhnya sesuai target, peningkatan nilai tersebut mengindikasikan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan berbasis potensi lokal sudah mulai memberikan hasil yang nyata.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) justru menunjukkan tren positif yang konsisten. Realisasi IKM selalu melampaui target, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 115,60 persen. Bahkan pada tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi 84,3, realisasi masih mampu mencapai nilai 88,95 atau 105,52 persen dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jumantono terus mengalami peningkatan, baik dari segi responsivitas, kecepatan, maupun kenyamanan layanan. Peningkatan kepuasan masyarakat ini dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah kecamatan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2.4. Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumantono
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	Skor	NA	73,50	NA	69	65,75	95,29	65	67,15	103,3	75,3	68,65	91,16
Indeks Desa Membangun	Skor	NA	NA	NA	NA	0,6935	NA	NA	0,7029	NA	0,8	0,7157	89,46
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72	74,2	103,06	74	84,3	113,92	75	86,7	115,60	84,3	88,95	105,52

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar pada periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indikator kinerja utama dan kinerja kegiatan (IKU dan IKK) selalu tercapai 100% setiap tahun, menunjukkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Kondisi ini menandakan adanya manajemen kinerja yang efektif serta koordinasi yang baik antara perangkat kecamatan dan pemerintah desa. Selain itu, indikator “Persentase wilayah dalam keadaan kondusif” juga selalu mencapai 100%, mencerminkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga secara berkelanjutan, yang menjadi fondasi penting bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari nilai 77,91 pada tahun 2021 menjadi 88,95 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kecepatan pelayanan, responsivitas aparatur, maupun kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Capaian IKM yang melebihi 100% dari target menandakan bahwa masyarakat menilai kinerja kecamatan lebih baik daripada yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya inovasi pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, atau penerapan teknologi informasi dalam proses pelayanan publik yang mampu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna layanan.

Namun demikian, terdapat dua indikator yang sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023–2024, yaitu Persentase peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang terkondisikan serta Persentase desa/kelurahan tertib perda, yang masing-masing mencapai 99,93% dan 99%. Meskipun deviasinya kecil, penurunan ini menunjukkan adanya beberapa kendala lapangan, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan kebangsaan atau keterlambatan pelaporan dan verifikasi kegiatan di tingkat desa. Hal ini menjadi catatan penting bagi Kecamatan Jumantono agar memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi serta pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, sehingga seluruh target dapat tercapai secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Indikator Program Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79	77,91	98,62	79	84,3	105,3	79	87,4	103,1	79	88,95	112,6
Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Kegiatan Wawasan Kebangsaan Dan Keagamaan Yang Terkondisikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,93	100	99	99
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase desa/kelurahan tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	100	99,75	99,75	100	99	99

Pada tahun 2022, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki target anggaran sebesar Rp 2.272.367.000,00 dengan realisasi Rp 1.974.551.839,00 (capaian 86,89%). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dialokasikan Rp 2.867.400,00 dan terealisasi penuh Rp 2.867.400,00 (100%). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memperoleh anggaran Rp 16.008.000,00 dan terealisasi Rp 16.008.000,00 (100%). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki target Rp 275.576.100,00 dengan realisasi Rp 275.376.100,00 (99,93%). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dialokasikan Rp 86.713.100,00 dan realisasi Rp 86.670.600,00 (99,95%). Program Pembinaan dan Pengawasan Desa memperoleh anggaran Rp 17.462.400,00 dan terealisasi Rp 17.462.400,00 (100%). Secara keseluruhan, tingkat penyerapan tahun 2022 tergolong tinggi pada hampir semua program, meski Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum mencapai target penuh.

Untuk tahun 2023, setiap program telah ditetapkan target anggaran berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 2.405.432.258; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp 5.499.000,00; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 185.200.000,00; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 138.716.000,00; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 102.994.300,00; dan Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Rp 51.525.800,00. Penyerapan anggaran tahun 2023 umumnya optimal dengan capaian antara 94,99%–100%, menunjukkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana sesuai rencana, meski perlu evaluasi untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar capaian mendekati 100%.

Pada tahun 2024, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.240.980.305,00 dengan realisasi Rp 2.136.748.807,00 (95,34%). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki alokasi Rp 6.013.500,00 dan terealisasi penuh Rp 6.013.500,00 (100%). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dialokasikan Rp 14.361.400,00 dan terealisasi Rp 14.361.400,00 (100%). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memperoleh anggaran Rp 133.384.900,00 dan terealisasi Rp 133.384.900,00 (100%). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki target Rp 75.969.750,00 dengan realisasi Rp 72.169.750,00 (94,99%). Program Pembinaan dan Pengawasan Desa ditetapkan anggaran Rp 51.937.650,00 dan terealisasi Rp 51.836.800,00 (99,80%). Penyerapan anggaran tahun 2024 umumnya optimal dengan capaian antara 90,99%–100%, menunjukkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana sesuai rencana, meski perlu evaluasi untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar capaian mendekati 100%.

Secara keseluruhan, data 2021, 2022, 2023 dan 2024 memperlihatkan penyerapan anggaran yang tinggi pada hampir semua program, teruskan monitoring dan pelaporan berkala, dan evaluasi faktor penyebab capaian di bawah 100% pada program tertentu agar target berikutnya dapat dicapai secara konsisten.

Tabel 2.5
Capaian Anggaran Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

No.	Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.664.241.000	2.464.454.698	92,50	2.272.367.000	1.974.551.839	86,89	2.405.432.258	2.173.251.103	90	2.240.980.305	2.136.748.807	95,34
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.000.000	2.000.000	100	2.867.400	2.867.400	100	5.499.000	5.499.000	100	6.013.500	6.013.500	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.500.000	8.500.000	100	16.008.000	16.008.000	100	185.200.000	185.200.000	100	14.361.400	14.361.400	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.313.600	70.313.600	100	275.576.100	275.376.100	99,93	138.716.000	138.716.000	100	133.384.900	133.384.900	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.525.000	17.525.000	100	86.713.100	86.670.600	99,95	102.994.300	102.319.300	99	75.969.750	72.169.750	94,99
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	38.500.000	38.500.000	100	17.462.400	17.462.400	100	51.525.800	51.365.800	99,75	51.937.650	51.836.800	99,80

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum merupakan kelompok sasaran utama dari layanan kecamatan. Mereka mencakup seluruh warga yang berdomisili atau memiliki kepentingan administratif di wilayah kecamatan, termasuk penduduk tetap, pendatang, dan kelompok rentan. Kecamatan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat umum, antara lain pengantar administrasi kependudukan (seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah), surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan surat pengantar lainnya. Selain itu, kecamatan juga menjadi tempat masyarakat mengajukan pengaduan, konsultasi, serta mendapatkan informasi terkait pelayanan publik. Peran kecamatan adalah memudahkan akses warga terhadap layanan pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan berlangsung cepat, akuntabel, dan transparan.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Pemerintah desa dan kelurahan, termasuk kepala desa, lurah, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan kelompok sasaran penting yang dibina oleh kecamatan. Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Layanan yang diberikan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (seperti RKPDDes dan APBDes), evaluasi kinerja pemerintah desa, pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa, serta penyampaian kebijakan pemerintah kabupaten ke tingkat desa. Kecamatan juga membantu menyelesaikan permasalahan antarwarga atau antarlembaga desa serta memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan kelurahan.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan meliputi organisasi-organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), kelompok tani, kelompok perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kecamatan memiliki tugas untuk membina dan memfasilitasi kegiatan lembaga-lembaga ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan yang diberikan dapat berupa pelatihan kapasitas kelembagaan, penyediaan informasi program pemerintah, fasilitasi kegiatan gotong royong, dan penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat. Peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menjembatani pemerintah dengan warga, sehingga kecamatan berkewajiban memperkuat peran serta mereka melalui pendekatan partisipatif dan inklusif.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

Tabel 2.7.
Permasalahan Kecamatan Jumantono
Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten • Beban kerja antar pegawai belum seimbang
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarpras pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

2.2.2. Isu Strategis

Berkaitan dengan peran Kecamatan Jumantono dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Isu Strategis Kecamatan Jumantono
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jumantono	Permasalahan Kecamatan Jumantono	Isu KLHS yang Relevan Dengan Kecamatan Jumantono	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jumantono			Isu Strategis Kecamatan Jumantono
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Pertanian pangan menjadi basis utama dengan lahan sawah produktif yang menghasilkan padi, jagung, dan palawija. • Perkebunan dan hortikultura memiliki potensi besar melalui komoditas tebu, kelapa, tanaman keras, serta pemanfaatan lahan kering. • Peternakan berkembang dengan dukungan kelompok ternak masyarakat, meliputi sapi, kambing, ayam, dan itik. • Industri rumah tangga dan usaha lokal tumbuh melalui produk olahan pangan, kerajinan, serta kegiatan ekonomi desa yang memanfaatkan tenaga kerja produktif. • Pariwisata dan budaya desa didukung oleh tradisi lokal, wisata religi, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur desa seperti jalan dan irigasi.	• Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi • Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal • Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Peningkatan angka Kemiskinan • Rendahnya Daya Saing Ekonomi	• Geopolitik dan Geoekonomi	• Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. • Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. • <i>Aging population</i> negara maju.	• Tata Kelola Pemerintahan dinamis dan berintegritas	• Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **“Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa”**. Hal ini disebabkan oleh :

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pasangan Kepala Daerah terpilih telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 20 Februari 2025. Masa jabatan mereka akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2030. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR : Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih :

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi 4. Merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD, disampaikan bahwa tujuan perangkat daerah disusun dengan memperhatikan NSPK kementerian dan tujuan serta sasaran daerah. Tujuan daerah yang diacu dalam penyusunan Renstra adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sasaran Daerah Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah maka tujuan renstra Kecamatan Karanganyar adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan. Dalam rangka mencapai tujuan diatas sasaran yang dirumuskan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dijabarkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2029

Misi Daerah	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasi kan	%	75,00	78,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai	88,95	89,00	89,10	89,20	89,30	89,50	89,60

3.2. Strategi

Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program-program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (*outcome*) dari program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Seluruh strategi dan arah kebijakan dirancang berdasarkan tugas dan fungsi dinas.

Dalam rangka meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pemerintahan, Kecamatan Jumantono menetapkan beberapa strategi utama yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan karakter wilayah perdesaan.

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. Sarana pelayanan di tingkat kecamatan maupun desa juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital guna mempermudah akses dan efisiensi layanan.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia baik di lingkungan kecamatan maupun pemerintah desa dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis. Langkah ini bertujuan menciptakan aparatur yang profesional, komunikatif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa menjadi bagian penting strategi. Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan LPMD, serta penguatan infrastruktur pelayanan publik di desa guna mendukung pelaksanaan program kecamatan secara efektif dan partisipatif.
4. Kecamatan Jumantono terus memperkuat koordinasi dengan unsur keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP, serta membina sistem keamanan lingkungan melalui Linmas, RT, dan RW. Di sisi lain, pembinaan wawasan kebangsaan bersama tokoh agama dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dan menjaga kerukunan masyarakat desa.



Gambar 3.1.
Tema Prioritas Pembangunan Kecamatan Jumantono Tahun 2026-2030

Tabel 3.2.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Tata Kelola Kecamatan dan Desa yang Responsif serta Peningkatan Kapasitas SDM Lokal	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Mendukung Ketahanan Sosial Ekonomi Wilayah	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Ketertiban Masyarakat untuk Mendukung Ekonomi Pedesaan	Transformasi Pelayanan Publik Kecamatan dan Desa yang Nyaman, Mudah Diakses, dan Inklusif	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang BERDAYA dan INKLUSIF Menuju Jumantono yang Maju
• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik Kecamatan dan Pemerintah Desa yang mendukung pelayanan cepat, inklusif, dan menjangkau seluruh masyarakat. • Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis data dan partisipatif di tingkat kecamatan dan desa. • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis, digitalisasi	• Penguatan kelembagaan desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan LPMD sebagai mitra strategis dalam pembangunan partisipatif berbasis potensi lokal. • Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat desa melalui dukungan UMKM, koperasi desa, BUMDes, dan pelatihan kewirausahaan, berkoordinasi	• Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar antar desa (jalan usaha tani, jembatan, saluran irigasi, dan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat). • Peningkatan kapasitas dan peran Satlinmas desa serta pembentukan forum komunikasi keamanan masyarakat desa. • Penguatan peran RT dan RW dalam mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban, serta menjaga keamanan lingkungan berbasis gotong royong. • Penguatan koordinasi antara kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, dan Satpol PP	• Penguatan sistem pelayanan publik di kecamatan dan desa yang ramah, sederhana, dan memperhatikan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan difabel. • Penerapan layanan digital dan integrasi data pelayanan desa untuk efisiensi dan kemudahan akses masyarakat. • Pemberdayaan masyarakat secara inklusif dalam proses	• Penguatan pelayanan publik di kecamatan dan desa yang ramah, mudah, cepat, serta inklusif berbasis teknologi dan keterlibatan masyarakat. • Terwujudnya lingkungan desa yang aman, tertib, dan harmonis sebagai fondasi pembangunan wilayah berkelanjutan. • Kelembagaan kecamatan dan desa

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
administrasi, dan penguatan etika pelayanan publik. • Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan dan desa dalam tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik berbasis transparansi dan partisipasi.	dengan perangkat daerah terkait. • Penguatan peran RT dan RW dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, aktif, dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat.	dalam menjaga ketenteraman wilayah. • Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama melalui forum lintas tokoh masyarakat dan kegiatan sosial desa.	perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. • Penguatan ketertiban dan keamanan melalui kolaborasi dengan warga dan tokoh desa dalam penyelesaian konflik sosial secara musyawarah. • Penguatan peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik dan keamanan berbasis komunitas.	yang adaptif, kolaboratif, dan profesional dalam mendukung pembangunan Karanganyar Baru yang berakar dari kekuatan lokal Jumantono.

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Jumantono dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat difokuskan pada :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis dan digitalisasi layanan publik.
2. Mendorong perencanaan pembangunan partisipatif berbasis data di tingkat desa dan kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana pelayanan publik agar lebih ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan desa yang transparan dan terukur.
5. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang Taruna, LPMD, BPD) dalam pelaksanaan program pembangunan.
6. Memfasilitasi pengembangan UMKM desa melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan promosi produk lokal.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa (BUMDes, koperasi desa) agar berperan aktif dalam penguatan ekonomi keluarga.
8. Mengoptimalkan peran RT/RW sebagai penggerak sosial dan pelapor permasalahan sosial ekonomi di lingkungan.
9. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi) yang mendukung konektivitas antar desa dan kegiatan ekonomi warga.
10. Memperkuat peran linmas desa dan koordinasi tiga pilar (Kecamatan, TNI, Polri) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.
11. Mendorong inisiatif keamanan berbasis masyarakat melalui forum warga dan sistem pelaporan RT/RW.
12. Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan lintas agama dan budaya.
13. Mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
14. Mengembangkan layanan publik berbasis satu pintu di kecamatan dengan pendekatan ramah dan inklusif.
15. Melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik.
16. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang aktif, cepat tanggap, dan terbuka.
17. Membangun ekosistem pemerintahan desa dan kecamatan yang kolaboratif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
18. Mewujudkan kecamatan dan desa yang mandiri secara kelembagaan dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah.
19. Mendorong integrasi data, program, dan kebijakan antara kecamatan dan desa sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.
20. Menyusun standar pelayanan minimal bersama desa untuk memastikan kesetaraan layanan dasar di seluruh wilayah Jumantono.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kecamatan Jumantono Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. • Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia baik di lingkungan kecamatan maupun pemerintah desa dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis. • Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa menjadi bagian penting strategi. • Kecamatan Jumantono terus memperkuat koordinasi dengan unsur keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP, serta membina sistem keamanan lingkungan melalui Linmas, RT, dan RW.	• Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan; • Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi; • Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah; • Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong	• Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis dan digitalisasi layanan publik. • Mendorong perencanaan pembangunan partisipatif berbasis data di tingkat desa dan kecamatan. • Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana pelayanan publik agar lebih ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. • Membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan desa yang transparan dan terukur. • Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang Taruna, LPMD, BPD) dalam pelaksanaan program pembangunan. • Memfasilitasi pengembangan UMKM desa melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan promosi produk lokal. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kualitas Smart City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; • Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip; • Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; • Peningkatan keamanan informasi daerah; • Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat; • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD; • Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko;	(BUMDes, koperasi desa) agar berperan aktif dalam penguatan ekonomi keluarga. • Mengoptimalkan peran RT/RW sebagai penggerak sosial dan pelapor permasalahan sosial ekonomi di lingkungan. • Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi) yang mendukung konektivitas antar desa dan kegiatan ekonomi warga. • Memperkuat peran linmas desa dan koordinasi tiga pilar (Kecamatan, TNI, Polri) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan. • Mendorong inisiatif keamanan berbasis masyarakat melalui forum warga dan sistem pelaporan RT/RW. • Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan lintas agama dan budaya. • Mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat desa.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			• Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas e-procurements, kualitas sarana dan prasarana; • Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan;	• Mengembangkan layanan publik berbasis satu pintu di kecamatan dengan pendekatan ramah dan inklusif. • Melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik. • Membangun sistem pengaduan masyarakat yang aktif, cepat tanggap, dan terbuka. • Membangun ekosistem pemerintahan desa dan kecamatan yang kolaboratif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan. • Mewujudkan kecamatan dan desa yang mandiri secara kelembagaan dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah. • Mendorong integrasi data, program, dan kebijakan antara kecamatan dan desa sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. • Menyusun standar pelayanan minimal bersama desa untuk memastikan kesetaraan layanan dasar di seluruh wilayah Jumantono.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

- 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dalam rangka mencapai program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam program ini sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menangani tentang kebutuhan rutin untuk mendukung kelancaran administrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mencapai program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam program ini sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1.
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jumatono

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya koordinasi dan ketertiban umum			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pemerintahan umum				
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			• Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		• Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
		Meningkatnya kualitas APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			- Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			• Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa • Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
		Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			• Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			• Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			• Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			• Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Tersedianya Bahan Logistik Kantor • Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan • Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			• Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
			Meningkatnya sarana prasarana sesuai standar		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			• Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Tersedianya Mebel • Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya • Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		• Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			• Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			• Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya		• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Terlaksananya Pemeliharaan Mebel • Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. • Pemeliharaan Mebel • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. • Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	75,00			80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	88,95	89,00		89,10		89,20		89,30		89,50		89,60		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	3.007.050,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	Kegiatan	12,00	12,00	3.007.050,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Na	Na	3.007.050,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	11.830.700,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	Lembaga	11,00	11,00	11.830.700,00	11,00	18.846.400,00	11,00	18.846.400,00	11,00	18.846.400,00	11,00	18.846.400,00	11,00	18.846.400,00	
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	11,00	11,00	7.030.700,00	11,00	11.100.000,00	11,00	11.100.000,00	11,00	11.100.000,00	11,00	11.100.000,00	11,00	11.100.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	11,00	11,00	4.800.000,00	11,00	7.746.400,00	11,00	7.746.400,00	11,00	7.746.400,00	11,00	7.746.400,00	11,00	7.746.400,00	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	126.263.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketenteraman dan ketertiban umum	Wilayah	11,00	11,00	126.263.000,00	11,00	6.000.000,00	11,00	6.000.000,00	11,00	6.000.000,00	11,00	6.000.000,00	11,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12,00	12,00	126.263.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	100,00	69.850.950,00	100,00	80.807.000,00	100,00	80.807.000,00	100,00	80.807.000,00	100,00	80.807.000,00	100,00	80.807.000,00	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	Kegiatan	4,00	4,00	69.850.950,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	Orang	75,00	75,00	42.000.000,00	75,00	47.000.000,00	75,00	47.000.000,00	75,00	47.000.000,00	75,00	47.000.000,00	75,00	47.000.000,00	

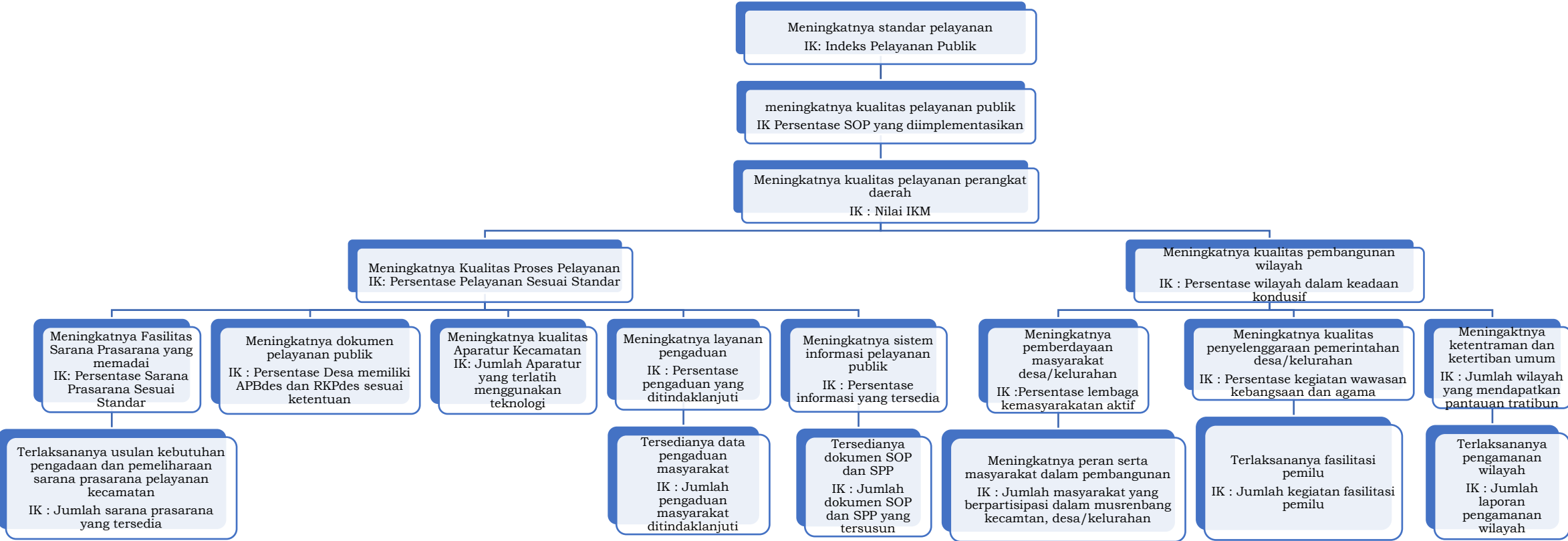
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	360,00	130,00	9.050.950,00	130,00	12.207.000,00	130,00	12.207.000,00	130,00	12.207.000,00	130,00	12.207.000,00	130,00	12.207.000,00	
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12,00	12,00	18.800.000,00	12,00	21.600.000,00	12,00	21.600.000,00	12,00	21.600.000,00	12,00	21.600.000,00	12,00	21.600.000,00	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	27.904.150,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	21.564.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12,00	12,00	8.405.200,00	12,00	4.405.200,00	12,00	4.405.200,00	12,00	4.205.200,00	12,00	4.205.200,00	12,00	4.205.200,00	
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	Dokumen	12,00	12,00	11.444.100,00	12,00	5.444.100,00	12,00	5.444.100,00	12,00	5.144.100,00	12,00	5.144.100,00	12,00	5.144.100,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12,00	12,00	10.120.000,00	11,00	5.120.000,00	11,00	5.120.000,00	12,00	5.120.000,00	12,00	5.120.000,00	12,00	5.120.000,00	
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12,00	12,00	6.340.050,00	12,00	4.094.800,00	12,00	4.094.800,00	12,00	4.094.800,00	12,00	4.094.800,00	12,00	4.094.800,00	
7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Na	Na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	500.000,00	4,00	500.000,00	4,00	500.000,00	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	68,65	68,70	2.243.596.657,00	68,75	2.560.392.540,00	68,85	2.560.392.540,00	68,95	2.560.392.540,00	69,05	2.560.392.540,00	69,15	2.560.392.540,00	
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	%	100,00	100,00	6.572.680,00	100,00	8.872.680,00	100,00	8.872.680,00	100,00	8.872.680,00	100,00	8.872.680,00	100,00	8.872.680,00	
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	3.667.100,00	2,00	4.867.100,00	2,00	4.867.100,00	2,00	4.867.100,00	2,00	4.867.100,00	2,00	4.867.100,00	
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen	6,00	6,00	2.905.580,00	6,00	4.005.580,00	6,00	4.005.580,00	6,00	4.005.580,00	6,00	4.005.580,00	6,00	4.005.580,00	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang	%	100,00	100,00	1.759.688.117,00	100,00	1.858.484.000,00	100,00	1.858.484.000,00	100,00	1.858.484.000,00	100,00	1.858.484.000,00	100,00	1.858.484.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	perangkat daerah	diselesaikan															
7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12,00	13,00	1.759.688.117,00	13,00	1.858.484.000,00	13,00	1.858.484.000,00	13,00	1.858.484.000,00	13,00	1.858.484.000,00	13,00	1.858.484.000,00	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	%	100,00	100,00	125.543.860,00	100,00	191.243.860,00	100,00	191.243.860,00	100,00	191.243.860,00	100,00	191.243.860,00	100,00	191.243.860,00	
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12,00	12,00	3.654.050,00	12,00	5.054.050,00	12,00	5.054.050,00	12,00	5.054.050,00	12,00	5.054.050,00	12,00	5.054.050,00	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	3.500.000,00	12,00	6.300.000,00	12,00	6.300.000,00	12,00	6.300.000,00	12,00	6.300.000,00	12,00	6.300.000,00	
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	3.700.000,00	12,00	6.800.000,00	12,00	6.800.000,00	12,00	6.800.000,00	12,00	6.800.000,00	12,00	6.800.000,00	
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	12,00	3.300.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	109.565.810,00	12,00	165.265.810,00	12,00	165.265.810,00	12,00	165.265.810,00	12,00	165.265.810,00	12,00	165.265.810,00	
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6,00	6,00	1.824.000,00	6,00	1.824.000,00	6,00	1.824.000,00	6,00	1.824.000,00	6,00	1.824.000,00	6,00	1.824.000,00	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana sesuai standar	Persentase sarana prasarana sesuai standar	%	100,00	100,00	25.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	2,00	25.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	284.200.000,00	100,00	384.607.000,00	100,00	384.607.000,00	100,00	384.607.000,00	100,00	384.607.000,00	100,00	384.607.000,00	
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12,00	1.200.000,00	12,00	1.200.000,00	12,00	1.200.000,00	12,00	1.200.000,00	12,00	1.200.000,00	12,00	1.200.000,00	
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	37.000.000,00	12,00	40.800.000,00	12,00	40.800.000,00	12,00	40.800.000,00	12,00	40.800.000,00	12,00	40.800.000,00	
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	246.000.000,00	12,00	342.607.000,00	12,00	342.607.000,00	12,00	342.607.000,00	12,00	342.607.000,00	12,00	342.607.000,00	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	42.592.000,00	100,00	67.185.000,00	100,00	67.185.000,00	100,00	67.185.000,00	100,00	67.185.000,00	100,00	67.185.000,00	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	5,00	28.000.000,00	5,00	42.000.000,00	5,00	42.000.000,00	5,00	42.000.000,00	5,00	42.000.000,00	5,00	42.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27,00	25,00	8.997.000,00	25,00	17.590.000,00	25,00	17.590.000,00	25,00	17.590.000,00	25,00	17.590.000,00	25,00	17.590.000,00	
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Unit	2,00	2,00	5.595.000,00	2,00	7.595.000,00	2,00	7.595.000,00	2,00	7.595.000,00	2,00	7.595.000,00	2,00	7.595.000,00	

Secara ringkas dukungan Kecamatan Jumantono terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut:



Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Kecamatan Jumantono

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	✓ Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ✓ Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ✓ Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ✓ Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ✓ Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	✓ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif. ✓ Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. ✓ Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. ✓ Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi. ✓ Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.	A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa • Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Berikut ini dukungan Kecamatan Jumantono pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 4.4.
Dukungan Kegiatan Kecamatan Jumantono Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kewilayahan (Kecamatan)
2	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru		Kewilayahan (Kecamatan)
3	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)		Kewilayahan (Kecamatan)
	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		Kewilayahan (Kecamatan)
4	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya		Kewilayahan (Kecamatan)
5	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata		Kewilayahan (Kecamatan)

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
		- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Kecamatan Jumatono Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Kecamatan Jumatono Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumatono Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai IKM	Nilai	88,95	89,00	89,10	89,20	89,30	89,50	89,60

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jumantono akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan

sasaran strategis Kecamatan Jumantono sebagaimana peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *Stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Jumantono, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	